

ARTI PENTING LITERASI SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN PROBLEM PEMALAKAN DI SEKITAR LOKASI WISATA DI PROPINSI YOGYAKARTA

Yarmanto¹, Surwandono², M. Elfan Kaukab³, Ariyanto Nugroho⁴

¹Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

^{2,4}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 11 November 2022

Disetujui : 20 Januari 2023

Kata Kunci :

wisata literasi, pemalakan,
kesinambungan wisata

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan destinasi wisata favorit di Indonesia, baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Namun akhir-akhir ini muncul problem wisata yang memancing emosi publik, netizen bahkan pemerintah pusat terkait dengan aktivitas pemalakan di seputar tempat wisata. Artikel ini hendak mengevaluasi tata kelola pariwisata Yogyakarta dalam mengelola isu pemalakan dengan menggunakan pendekatan literasi wisata di tengah kebijakan utama pariwisata Yogyakarta yang berbasis wisata literasi. Dokumen yang dipakai sebagai acuan adalah 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, dan aspirasi masyarakat terkait isue pemalakan dan respon pemerintah terhadap aspirasi tersebut. Artikel menemukan bahwa tata kelola wisata literasi belum terdukung oleh supratruktur literasi wisata sehingga menyebabkan infrastruktur wisata yang tersedia belum mampu mengelola isu pemalakan di sekitar lokasi wisata secara efektif.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 11 November 2022

Accepted : 20 Januari 2023

Keywords:

literacy tourism, pemalakan,
tourism sustainability

ABSTRACT

Yogyakarta is a favorite tourist destination in Indonesia, both for foreign and domestic tourists. However, recently, there have been tourist problems that provoke public emotions, netizens and even the central government related to circumvention activities around tourist attractions. This article wants to evaluate the governance of Yogyakarta tourism in managing the issue of circumvention by using a tourism literacy approach in the midst of Yogyakarta's main tourism policy based on literacy tourism. The documents used 2 Regulations of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2019 concerning Amendments to the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Province Number 1 of 2012 concerning the Master Plan for the Development of Tourism in the Province of the Special Region of Yogyakarta in 2012-2025, and the aspirations of the community related to the issue of circumvention and the government's response to these aspirations. The article found that the governance of literacy tourism has not been supported by the tourism literacy structure, causing the available tourist infrastructure to not be able to effectively manage the issue of circumvention around tourist sites.

1. PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan wilayah yang ikonik bagi banyak kalangan yang pernah memiliki pengalaman tinggal di Yogyakarta (Wibisono & Sulistya, 2022). Apakah pengalaman tinggal tersebut dalam jangka pendek seperti keperluan berwisata, berbisnis ataupun jangka panjang seperti aktivitas menempuh jenjang pendidikan. Kesan ikonik Yogyakarta terbangun oleh struktur masyarakat yang bervariasi, dari kultur agraris dengan lahan pertanian dan perkebunan yang subur sampai dengan kultur pantai yang juga unik dengan sejumlah pantai yang bervariasi di sepanjang pantai selatan Yogyakarta (Wilopo et al., 2021).

Yogyakarta juga memiliki sejumlah pegunungan dengan keanekaragaman pemandangan. Dari pegunungan Merapi dengan wisata alam, wisata literasi bencana, sampai dengan wisata kulinernya (Rindrasih, 2018). Demikian pula wisata di pegunungan di Gunung Kidul dengan kekhas tanah berbasis kars (Kusumayudha et al., 2021), maupun pegunungan Menoreh di Kulon Progo dengan basis perkebunan teh dan buah-buahan (Bawole, 2021). Atau pun pegunungan di Kawasan Bantul dengan keanekaragaman spot wisata yang menarik dan instagrammable (Al-Azizah et al., 2021).

Ikonik juga terdukung oleh kultur Kraton Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang, dan sampai saat ini masih dikonservasi dengan sangat baik. Baik dari infrastruktur bangunan kraton yang masih lestari, bersih, dan asri, sampai dengan terjaganya sejumlah produk kebudayaan seperti seni tari, musik gamelan sampai dengan tradisi geguritan atau berpantun (Hughes-Freeland, 1993). Dan kemudian terbangun bersama dalam kultur urban modernis dalam ikon Malioboro yang menambah kesan eksotis Yogyakarta (Cahya et al., 2017), sebagaimana tergambarkan dalam lirik lagu Katon Bagaskara dalam album Yogyakarta.

Yang tidak kalah penting dari ikonik Yogyakarta adalah keramah-tamahan penduduk Yogyakarta dalam menyambut para pendatang sebagai cerminan budaya agraris yang sangat kental. Keramahan dalam pilihan kata yang unik dan selaras peruntukkanya, sampai dengan mimik dan gestur tubuh yang menebar senyum menyapa dan memberikan sentuhan untuk

bersalaman. Tagline senyum sapa dan salam telah menjadi ikon relasi sosial yang sudah terbangun di Yogyakarta yang membuat banyak orang yang pernah berinteraksi dengan penduduk Yogyakarta memiliki kerinduan untuk berkunjung kembali (Kusumawati et al., 2022).

Pandemik Covid19 telah banyak mengubah tata kelola kehidupan dalam masyarakat dan tidak terkecuali dengan di Yogyakarta (Pramana et al., 2022). Salah satu issue yang marak adalah citra wisata Yogyakarta pasca Covid19, di mana terdapat berita yang cukup menghentak publik di Yogyakarta terkait dengan informasi tentang pemalakan sampai dengan premanis di seputar wisata (Pikiranrakyat.com, 2022). Dari pemalakan terhadap wisatawan yang melakukan pemaksaan pembayaran tarif parkir yang tinggi, harga makanan di kaki lima yang tidak wajar, sampai dengan pembayaran tiket masuk di kawasan wisata berkali-kali ketika wisatawan melakukan swafoto terhadap objek yang instagramable. Bukan hanya itu, meningkatnya fenomena Klithih di Yogyakarta juga meningkatkan kekhawatiran wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta, atau melakukan perjalanan untuk menikmati suasana malam di Yogyakarta (Tempo.co, 2021).

Fenomena pemalakan ini ternyata tidak hanya terjadi di satu tempat saja. Sejumlah kejadian pemalakan yang viral dalam group Facebook Info Cegatan Jogja terjadi di sejumlah lokasi wisata, baik di kabupaten Sleman di seputar tempat wisata Gunung Merapi (waspada.co.id, 2022), di Kota Yogyakarta seputar tempat wisata Malioboro (Okezone.com, 2022), di kabupaten Bantul di seputar tempat wisata Gumuk Pasir Depok (Tribunnews.com, 2022). Hal serupa juga terjadi di tempat wisata di Gunung Kidul, di mana ada pemalakan parker yang sempat viral di media massa (Harianjogja.com, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa problem premanisme dalam wisata di Yogyakarta mulai menjadi problem sosial, dan bukan sektoral dan aksidental.

Pemerintah propinsi Yogyakarta sebenarnya telah menyusun tata kelola wisata secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025. Regulasi dengan tebal 147 halaman memuat regulasi pariwisata disertai dengan penjelasan, dan Rencana Strategis Pariwisata di Yogyakarta.

Artikel ini hendak melakukan analisis terhadap struktur tatakelola wisata terkait dengan hadirnya variabel premanisme yang berimplikasi terhadap isu sentral dalam wisata yakni variabel “kenyamanan” bagi wisatawan. Apakah gagasan kenyamanan wisatawan sudah mendapatkan porsi regulasi yang memadai, dan bagaimana cara pencegahannya secara efektif. Gagasan ini akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan literasi wisata sebagai konsep dasar tentang bagaimana informasi pariwisata disampaikan ke masyarakat, dan bagaimana mengedukasi penyedia jasa wisata termasuk di dalamnya para wisatawan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang wisata yang berkelanjutan menjadi kajian yang mendapatkan perhatian serius terkait dengan potensi wisata sebagai pilar ekonomi dari masyarakat bahkan negara (Haryanto, 2014). Wisata berkelanjutan bermakna tentang terus hadirnya wisatawan baik wisatawan yang pernah hadir sebelumnya, ataupun hadirnya wisatawan baru sehingga industri wisata dapat tumbuh dan berkembang secara baik (López-Sánchez & Pulido-Fernández, 2017).

Dalam konteks pariwisata pasca pandemic Covid19, studi dari Carina menunjukkan bahwa pemasaran wisata harus mengeksplorasi penyampaian informasi tentang variabel kenyamanan dan keamanan secara sistematis (Van Schalkwyk & Saayman, 2006). Apakah terkait tentang penyediaan fasilitas kesehatan dan kedaruratan terkait dengan problem kesehatan yang dialami secara global, sampai dengan kejelasan pelayanan wisata, sebagaimana studi dari Cerna (Černá, 2021). Sebagaimana studi dari Hidayat terhadap tata kelola wisata di Pangandaran, sebuah obyek wisata yang memiliki keunikan dan eksotisme pantai. Kajian Hidayat menunjukkan bahwa keunggulan dan keunikan obyek wisata tidak menjamin sebuah obyek wisata akan

mendapatkan kunjungan wisata yang tinggi, namun kunjungan tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perencanaan kebijakan yang komprehensif terhadap obyek wisata (Hidayat, 2016).

Gagasan tentang evaluasi terhadap tata kelola wisata menjadi kajian yang menarik dalam konteks pembangunan wisata yang berkesinambungan. Kajian Carlos memberikan temuan menarik bahwa yang akan sangat dikenang oleh wisatawan, terlebih wisatawan asing adalah kualitas terhadap jasa pelayanan wisata. Semakin wisatawan merasa mendapatkan pelayanan wisata yang baik, maka akan berpeluang besar untuk mengunjungi kembali tempat wisata tersebut, dan menyampaikan kepada koleganya (Vergara-Schmalbach et al., 2021). Dalam konteks ini wisata yang berkesinambungan adalah wisata yang mampu melakukan reframing terhadap sejumlah kebutuhan dari wisatawan, baik sebelum wisatawan berkunjung, sewaktu berkunjung sampai dengan wisatawan berkunjung kembali, sebagaimana dalam kajian Seyfi (Seyfi, 2017).

Bagian penting dalam membangun diskursus reframing dalam wisata adalah membangun gagasan tentang literasi wisata. Literasi wisata merupakan konsep untuk meningkatkan pengetahuan bagi penyedia wisata terhadap semua hal yang terkait dengan kebutuhan para wisatawan secara sistematis dan informatif. Dalam kajian Shirmohammadi menunjukkan bahwa variable literasi wisata dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, terkait dengan informatif semua informasi tentang wisata yang dibutuhkan (Shirmohammadi et al., 2020). Studi Dai juga menunjukkan wisatawan memerlukan informasi wisata secara sistematis sebagai upaya membangun kohesitas dengan penduduk local (Dai et al., 2021). Terlebih bila wisata yang dijual adalah wisata yang berbasis rekreasi lingkungan. Ketersediaan pemandu wisata yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap obyek wisata yang dikunjungi akan membuat komunikasi antara pengelola wisata dan wisatawan terjalin dengan baik. Di sinilah arti penting literasi wisata dikelola dengan baik oleh pemerintah secara sistematis.

Literasi wisata berbeda dengan wisata literasi. Wisata literasi adalah wisata yang

memberikan layanan berupa pengetahuan spesifik dari obyek wisata yang ditawarkan. Wisatawan akan mendapatkan pengetahuan terkait obyek wisata secara detil dan komprehensif. Misal wisata dengan basis museum yang akan memberikan pengetahuan terhadap semua benda yang didipertunjukkan dalam museum (Yuningsih & Kusmiarti, 2019). Wisata Planetarium, sebuah wisata yang akan memberikan informasi terkait tentang planet dan bagaimana tata kelola planet berotasi (Görecek Baybars & Çil, 2021). Wisata berbasis kebun binatang, juga termasuk dalam wisata literasi, di mana wisatawan akan dapat informasi seluk beluk dari binatang, dari asalnya, perkembangannya sampai dengan habitat aslinya (Nekolný & Fialová, 2018). Bagaimana literasi wisata dilakukan? Merujuk studi dari Richard & Wilson, literasi wisata ditujukan untuk penyedia jasa wisata maupun kepada wisatawan. Kepada penyedia jasa wisata, basis literasinya kepada penyediaan layanan dan informasi paripurna terhadap para wisatawan. Termasuk di dalamnya informasi tentang obyek wisata maupun obyek wisata di sekitarnya yang dapat menjadi wisata selanjutnya. Gagasan ini terkait upaya membuat lama kunjungan wisata seorang wisatawan dalam satu obyek. Literasi wisata juga termasuk tentang biaya maupun akomodasi di sekitar obyek wisata, baik seperti harga kuliner, tarif hotel, atau penginapan, tarif transportasi jarak dekat maupun jarak jauh, termasuk dengan pilihan jenis modanya, sampai dengan tarif parkir ketika wisatawan menggunakan kendaraan sendiri ketika mengunjungi obyek wisata (Richards & Wilson, 2007).

Yang tidak kalah pentingnya dalam konteks inovasi literasi wisata adalah pendidikan dan training kepada para penyedia wisata, baik pemerintah maupun swasta tentang pentingnya layanan dan keterbukaan informasi kepada wisatawan. Bagaimana melakukan pelayanan wisata yang membuat para wisatawan merasa berada di lingkungan privatnya, sampai dengan pemberian informasi yang akurat kepada wisatawan. Termasuk bagaimana cara melakukan komunikasi secara efektif dan persuasif kepada wisatawan terkait dengan harga on the spot sehingga wisatawan merasa

diperlakukan secara adil (Hall & Williams, 2008).

Sedangkan pengelolaan informasi kepada wisatawan menjadi sangat penting, dalam studi Wilks (et.al), pengelolaan informasi terhadap wisatawan meliputi dua hal penting. Pertama, penyediaan informasi yang bisa diakses sebelum wisatawan mengunjungi obyek wisata agar kemudian wisatawan menjadi tertarik untuk berkunjung. Literasi ini dapat ditempuh dengan pembuatan portal informasi baik secara manual melalui penyediaan booklet informasi wisata dalam bentuk buku, majalah atau bulletin secara periodik. Maupun dalam bentuk platform digital dalam bentuk informasi di website sampai dengan platform media sosial seperti instagram, Facebook, Youtube (Wilks et al., 2005).

Kedua, literasi wisata dengan penyediaan akses informasi yang dapat diakses secara mudah ketika wisatawan telah melakukan kunjungan wisatawan. Literasi ini dapat ditempuh dengan penyediaan papan informasi di sejumlah titik strategis terkait dengan kenyamanan maupun keamanan dalam wisata, baik dengan papan informasi manual sampai dengan digital seperti tersedianya videotron. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketersediaan sumber daya manusia yang melakukan patroli secara periodik untuk senantiasa mengingatkan kepada wisatawan untuk berhati-hati ketika menikmati obyek wisata, terutama obyek wisata yang ekstrim dan berbahaya sampai dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi di obyek wisata.

3. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi tata kelola pariwisata di Yogyakarta terkait dengan variabel baru dalam dunia wisata yakni kehadiran premanisme dalam berbagai bentuk. Sumber data diperoleh dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, dan aspirasi masyarakat terkait isue pemalakan dari suara netizen dalam group Info Cegatan Jogja, sebuah group di lini media sosial Facebook yang sangat populer di

Yogyakarta sebagai ruang informasi maupun menyampaikan keluhan terkait dengan problematika sosial di Yogyakarta dan sekitarnya.

Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi makna “kenyamanan” berwisata dalam struktur regulasi, apakah kenyamanan lebih didominasi gagasan pemberian akses fasilitas dan konektivitas, ataukah sampai menyentuh gagasan keramahan sosial sebagai modal sosial. Dengan analisis terhadap aspek ini diharapkan dapat ditemukan formula terbaik bagi proses revisi regulasi kebijakan pariwisata di Yogyakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan akan dianalisis secara mendalam tentang problem premanisme wisata dalam bentuk aktivitas pemalakan di sekitar obyek wisata, dan analisis terhadap tata kelola pariwisata di propinsi Yogyakarta dalam dua Perda pariwisata, yakni Perda No. 1 tahun 2012, dan Perda No. 1 Tahun 2019.

4.1 Problem Keamanan dan Pemalakan di Lokasi Wisata

Diskusi tentang pemalakan di sekitar obyek wisata di Yogyakarta marak di dalam lini media social, terutama dalam group Facebook, “Info Cegatan Jogja”. Dalam group tersebut sangat sering diperbincangkan keluhan dari wisatawan baik dari Yogyakarta sendiri maupun dari luar Yogyakarta setelah netizen memposting

dan memberikan saluran aspirasi kepada wisatawan yang merasa mendapatkan perlakuan tidak wajar (Merahputih.com, 2021).

Hal serupa juga terjadi di lokasi wisata di sekitar pantai selatan di Bantul, di mana netizen membagikan pengalaman pernah mau dipalak (dithuthuk) ketika hendak melakukan pembayaran makan sea food yang dipesannya (suarajogja.com, 2021). Postingan ini kemudian viral dan mendapatkan respon sangat serius dari para pengusaha kuliner bahwa mereka sepakat untuk tidak melakukan perbuatan ini dan akan memberikan peringatan keras kepada pedagang makanan yang melakukan pemalakan (Tribunnews.com, 2022).

Berita tentang pemalakan terkait dengan pemalakan terhadap tarif parkir pada tahun 2022 dan viral di media social maupun media massa.

informasi seputar pemalakan. Atau pun dalam media massa, baik local dan nasional yang memberitakan secara Bersama-sama problem pemalakan di sekitar lokasi wisata.

Issue pemalakan di sekitar lokasi wisata terdiri dari 4 issue. Pertama, pemalakan terkait dengan tarif kuliner yang tidak masuk asal sampai dengan aksi tipu-tipuan dari pemilik warung di sekitar obyek wisata. Kedua, pemalakan terkait dengan tarif parkir di sekitar obyek wisata dari harga yang tidak wajar sampai dengan pelayanan dengan unsur paksaan. Ketiga, pemalakan terkait dengan tarif untuk pengambilan gambar ataupun menyaksikan obyek wisata secara langsung. Dan keempat, Pemalakan terkait dengan kriminalitas di obyek wisata sampai dengan aksi Klithih yang membuat wisatawan tidak nyaman ketika harus menikmati wisata Yogyakarta di malam hari.

Berita tentang pemalakan terkait dengan tarif kuliner yang tidak wajar, muncul di bulan Mei 2021, di mana netizen membagikan postingan sebuah harga kuliner tradisional yang tidak wajar di sekitar lokasi wisata di Malioboro (MediaIndonesia.com, 2021). Yang kemudian mendapatkan respon cepat dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku (Tempo.co, 2017). Bahkan YLKI juga bersuara tentang issue ini, dan meminta pemerintah untuk mengelola issue ini dengan baik (Kompas.com, 2021). Menanggapi fenomena ini paguyuban pedagang makanan di sekitar lokasi wisata Malioboro juga membuat pernyataan keras. Peristiwa ini berawal dari keluhan pengguna parkir yang dikenakan tarif parkir yang tidak wajar, di mana mencapai besaran 350 ribu, lebih mahal dibandingkan dengan biaya parkir di stasiun kereta api, hotel ataupun bandara, di mana hanya parkir 2 jam saja (PikiranRakyat.com, 2022). Tingginya biaya parkir tersebut sampai membuat Sandi Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif mengecam, karena akan berdampak serius kepada sector pariwisata yang sedang tumbuh kembali pasca pandemic Covid19 (Okezone.com, 2022).

Issue parkir juga menyeruak di obyek wisata pegunungan di Sleman, di mana wisatawan dipaksa untuk parkir kendaraannya yang jauh dari obyek wisata puncak Merapi. Dan jika hendak mencapai lokasi tersebut wisatawan

diminta untuk menggunakan kendaraan Jeep dengan bayaran tertentu atau berjalan kaki menuju lokasi tersebut (waspada.co.id, 2022). Postingan di ICJ terkait dengan fenomena nuthuk kuliner dan parker di lokasi wisata

Yogyakarta yang kemudian mendapatkan komentar sampai dengan 3.3 ribu dan dibaca lebih dari 6,6 ribu netizen serta dibagikan sebanyak 148 kali.



Gambar 1. Postingan Menyikapi Fenomena Nuthuk

Pemalakan di lokasi wisata terjadi terkait dengan proses pengambilan gambar yang memiliki icon yang instagrammable di sejumlah lokasi yang eksotis berbasis wisata alam maupun buatan dalam bentuk sumbang sukarela (Harianjogja.com, 2021). Kondisi ini kemudian direspon oleh pihak pengelola untuk menata ulang sejumlah tarif dan peruntukannya yang tidak memberatkan wisatawan. Sedangkan untuk issue aksi kriminal baik di lokasi wisata maupun fenomena Klithih yang menyebabkan sejumlah wisatawan mengurungkan berwisata atau mengurangi hari kunjungan ke Yogyakarta mendapatkan respon serius dari Sri Sultan HB X (Tempo .co, 2021).

4.2 Evaluasi Regulasi Wisata di Propinsi Yogyakarta

Yogyakarta memiliki destinasi wisata yang sangat lengkap di area yang sudah terkoneksi dan dapat dijangkau dengan mudah. Dari obyek yang berbasis wisata alam, pantai, pegunungan, teknologi, sejarah, budaya, pendidikan sampai wisata literasi yang unik terdapat di Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pengelolaan wisata secara obyektif dan komprehensif, hal ini tidak dapat dilepaskan tentang pentingnya sektor wisata bagi dinamika pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Yogyakarta. Namun dengan semakin maraknya kasus pemalakan di sekitar obyek wisata dan hadirnya fenomena kriminalitas jalanan seperti Klithih

perlu kiranya tata kelola pariwisata di Yogyakarta perlu dibenahi secara serius. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya gagasan literasi wisata, namun lebih banyak mengelola basis wisata literasi sebagai modal sosial penting pariwisata di Yogyakarta.

Dari Perda DIY No. 1 Tahun 2012 maupun Perda DIY No. 1 Tahun 2019 didapatkan informasi tentang artikulasi variabel keamanan, dan termasuk di dalamnya gagasan tentang konsep aman dan nyaman.

Pertama, dalam Perda No. 1 Tahun 2012, ditemukan sebanyak 2 gagasan yang terkait dengan keamanan, yakni keamanan secara umum (terkait dengan pertahanan) serta keamanan untuk fungsi pemadam kebakaran. Gagasan keamanan dalam dimensi tertib sipil sebenarnya sudah disebut, namun tidak kemudian diuraikan dalam tupoksi tertentu yang memungkinkan kolaborasi intensif antara sektor wisata dengan aparat keamanan. Namun yang justru diperdetil adalah dalam issue ketersediaan keamanan dalam bentuk fasilitas pemadam kebakaran.

Sedangkan gagasan atau kata keamanan tidak ditemui dalam struktur batang tubuh dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2019, dan hanya ditemukan dalam Renstra Pengembangan Pariwisata, di mana mendiskusikan tentang gagasan keamanan transportasi, dan sama sekali tidak menyinggung keamanan dalam dimensi relasi sosial berupa gangguan dari orang atau kelompok yang kemudian berpotensi mengancam eksistensi dan keberlangsungan

bisnis pariwisata. Artinya Perda paling mutakhir sekalipun belum memandang isu pemalakan sebagai isu yang perlu dikelola secara proaktif sehingga tata kelola menghadapi pemalakan cenderung secara reaktif dan hit and run.

. Dari analisis awal tercermin asumsi bahwa Yogyakarta sebagai kota yang sudah terjamin keamanannya dalam konteks relasi sosial sehingga tidak banyak diperlukan regulasi untuk melakukan pelebagaan keamanan secara komprehensif. Dan yang diperbincangkan hanya keamanan dalam dimensi transportasi dan resiko terhadap terjadinya kebakaran sebagai fenomena yang harus diantisipasi. Namun dengan semakin maraknya kasus pemalakan di sejumlah lokasi wisata, sangat penting kiranya gagasan literasi wisata dimasukkan sebagai gagasan besar untuk melengkapi gagasan wisata literasi.

Tabel 1. Diksi Keamanan dalam Perda No. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019

No.	Diksi	Perda DIY No. 1 Thn 2012	Perda DIY No. 1 Thn 2019
1	Keamanan	0	0
2	Aman	15	11
3	Nyaman	15	11

Sumber: Data Olahan

Bagaimana halnya dengan diksi, aman dan nyaman? Kedua diksi ini digunakan secara bersama-sama dengan diksi kata aman mendahului kata nyaman. Terdapat asumsi besar bahwa situasi aman akan mendukung situasi nyaman. Namun dalam uraiannya diksi ini lebih merujuk kepada sasaran dan tujuan pariwisata di Yogyakarta, sebagaimana diuraikan pertama kali dalam pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2012, maupun merujuk pada Misi Pariwisata di Yogyakarta sebagaimana diuraikan pertama kali dalam pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2012. Dan tidak ditemukan bagian, pasal ataupun ayat yang membahas secara rinci bagaimana situasi aman dan nyaman ini terkelola, terutama dalam relasinya antar stakeholders wisata di Yogyakarta. Gagasan aman diasumsikan sudah sebagai sesuatu yang given di Yogyakarta, atau dengan kata lain sudah tidak masalah lagi dengan isu keamanan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa penduduk Yogyakarta memiliki karakter kesantunan dan keramahmataman yang tinggi. Sehingga struktur regulasi pariwisata di Yogyakarta lebih

menghususkan terhadap isu nyaman sebagai bentuk layanan utamanya.

Suprastruktur regulasi juga perlu direvisi dengan mendiskusikan pelebagaan diksi aman secara lebih manifest, sehingga memungkinkan gagasan tersebut dapat melahirkan infrastruktur keamanan, apakah dengan memasukan diksi polisi wisata dalam struktur regulasi baik dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012, maupun Tahun 2019. Infrastruktur polisi wisata dapat menjadi pilihan untuk menjalankan fungsi informasi sampai dengan fungsi kurasi.

Lantas bagaimana dengan gagasan tentang pengelolaan Literasi Wisata, sebagai konsep kunci dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan? Dalam penelusuran terhadap dua dokumen Perda, diksi kata literasi tidak ditemukan sama sekali, maupun diksi kata literasi wisata juga tidak ditemukan. Hanya ditemukan diksi informasi yang memiliki kaitan dengan gagasan literasi.

Tabel 2. Diksi Literasi Wisata Perda No. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019

No.	Diksi	Perda DIY No. 1 Thn 2012	Perda DIY No. 1 Thn 2019
1	Literasi	0	0
2	Informasi	4	2

Sumber: Data Olahan

Gagasan tentang informasi merujuk kepada ketersediaan fasilitas informasi bagi wisatawan, maupun penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan wisata. Realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah propinsi DIY belum banyak mendiskusikan literasi wisata secara sistematis dan komprehensif. Dan kemudian terdukung oleh temuan terkait tentang praktik literasi dengan penggunaan diksi kata Pelatihan dan Pendidikan. Pilihan diksi ini dipilih terkait pilihan kata yang dipergunakan dalam perda wisata untuk memperbincangkan tentang gagasan awal literasi.

Tabel 3. Diksi Artikulasi Literasi Wisata Perda No. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019

No.	Diksi	Perda DIY No. 1 Thn 2012	Perda DIY No. 1 Thn 2019
1	Pendidikan	0	15
2	Pelatihan	0	2

Sumber: Data Olahan

Dalam konteks literasi wisata, kata pendidikan dapat ditemukan dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2019, dan tidak ditemukan dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012. Artinya terdapat gagasan baru dalam pengelolaan pariwisata. Meskipun harus diakui bahwa gagasan yang berbicara tentang literasi wisata hanya ditemukan 1 saja, dalam pasal 34, yang berbunyi, “peningkatan kualitas dan kontinuitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Daya Tarik Wisata”, dan 14 merujuk kepada Wisata Literasi atau Wisata Pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 17b, “Masjid Gede, Suronatan, Kauman dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, religi dan pendidikan “.

Sedangkan kata pelatihan, tidak ditemukan dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012, dan temukan sebanyak 2 kali dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2019 dalam pasal 25 yang berbunyi, “meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional melalui pelatihan dan sertifikasi” maupun dalam pasal 34, “peningkatan kualitas dan kontinuitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Daya Tarik Wisata”. Gagasan pelatihan dalam 2 pasal ini merujuk tentang gagasan literasi wisata, namun hanya menyangkut pengelola wisata baik pemerintah maupun non pemerintah, dan belum menyinggung tentang literasi wisata berbasis wisatawan atau pengguna.

5. PENUTUP

Tata kelola wisata menjadi pilar penting bagaimana sebuah program berjalan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik bahkan kesehatan yang cepat. Modal sosial Yogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan memiliki moderasi budaya dan pendidikan yang tinggi perlu dilembagakan dalam struktur regulasi wisata di Yogyakarta agar linier dengan pelayanan wisata di lapangan.

Pembuatan regulasi wisata yang komprehensif akan memungkinkan semua stakeholder mendapatkan benefit dari secara berkelanjutan sehingga menciptakan iklim pariwisata yang kondusif. Hal penting yang perlu diperkenalkan dan dilembagakan dalam tata kelola wisata adalah literasi wisata baik

kepada wisatawan maupun kepada penyedia jasa wisata.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada kolega di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo atas kemitraan dalam pelaksanaan riset tentang pengembangan wisata yang berkesinambungan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizah, L. H., Mulyo, J. H., & Perwitasari, H. (2021). Economic Valuation of Kebun Buah Mangunan at Sub-district Dlingo, Bantul. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 662, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/662/1/012004>
- Bawole, P. (2021). Community based design for developing tourism area in the Village of Karangwuni, Wates District, Kuloprogo Regency - Yogyakarta Special Region. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 738, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/738/1/012053>
- Cahya, G. A., Mahendra, Y. K. D., & Damanik, I. I. (2017). Malioboro as a value of Special District of Yogyakarta City. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 70, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/70/1/012055>
- Černá, J. (2021). The forest tourism and marketing communication in postCovid era (pp. 273–278). International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, i.a. and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110851548&partnerID=40&md5=674060c15e5784383fde48847a8ab8a1>
- Dai, Y. De, Wang, T. S., Zhuang, W. L., & Huan, T. C. (2021). Are you an awkward tourist? Keys to enhance the cohesion between

- tourists and local residents from the viewpoint of leisure literacy and recreationist-environment fit. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 312–325.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.04.002>
- Görecek Baybars, M., & Çil, M. (2021). Use of portable planetariums in teaching of astronomy: an activity example. *Science Activities*, 58(2), 43–51.
<https://doi.org/10.1080/00368121.2021.1906200>
- Hall, C. M., & Williams, A. M. (2008). Tourism and innovation. In *Tourism and Innovation*.
<https://doi.org/10.4324/9780203938430>
- Harianjogja.com. (2021). Diprotes Pengunjung dan Viral, Breksi Ubah Kebijakan Soal Kotak Sumbangan Sukarela. *Harianjogja.Com*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/03/512/1062576/diprotes-pengunjung-dan-viral-breksi-ubah-kebijakan-soal-kotak-sumbangan-sukarela>
- Harianjogja.com. (2022). Kecolongan Pungli Parkir Tepus, Dishub: Jukir Nakal Objek Wisata Bakal Ditertibkan. *Harianjogja.Com*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/05/11/513/1101026/kecolongan-pungli-parkir-tepus-dishub-jukir-nakal-objek-wisata-bakal-ditertibkan>
- Haryanto, J. T. (2014). Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Diy. *Jurnal Kawistara*, 4(3).
<https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>
- Hidayat, M. (2016). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 33.
<https://doi.org/10.17509/thej.v1i1.1879>
- Hughes-Freeland, F. (1993). Packaging dreams: Javanese perceptions of tourism and performance. In *Tourism in South-East Asia* (pp. 138–154).
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0027800941&partnerID=40&md5=3ed233c844c2489a75dff0961519abf6>
- Kompas.com. (2021). Kata YLKI soal Tarif Tak Masuk Akal Warung Makan di Tempat Wisata. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/02/150000265/kata-ylki-soal-tarif-tak-masuk-akal-warung-makan-di-tempat-wisata?page=all>
- Kusumawati, A., Rahayu, K. S., & Putra, E. W. (2022). Antecedents customer decision to visit Yogyakarta as special regions in Indonesia. In *Cogent Business and Management* (Vol. 9, Issue 1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2050062>
- Kusumayudha, S. B., Prastistho, B., Zakaria, M. F., Rahatmawati, I., & Setyaningrum, T. (2021). Rock Mass Rating and Feasibility Assessment of Karst Cave Geo-Ecotourism in Tanjungsari District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region, Indonesia. In *Geographia Technica* (Vol. 16, Issue 2, pp. 53–68).
https://doi.org/10.21163/GT_2021.162.05
- López-Sánchez, Y., & Pulido-Fernández, J. I. (2017). Factors influencing the willingness to pay for sustainable tourism: a case of mass tourism destinations. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 24(3), 262–275.
<https://doi.org/10.1080/13504509.2016.1203372>
- Mediaindonesia.com. (2021). Wisatawan Malioboro Keluhkan Harga Pecel Lele Tak Masuk Akal. *Mediaindonesia.Com*.
<https://mediaindonesia.com/nusantara/407514/wisatawan-malioboro-keluhkan-harga-pecel-lele-tak-masuk-akal>
- Merahputih.com. (2021). Wisatawan Bisa Laporan Jika Temukan Harga Makanan Tak Wajar di Malioboro. *Merahputih.Com*.
<https://merahputih.com/post/read/wisatawan-bisa-laporan-jogoboro-jika-temukan-harga-makanan-tak-wajar-di-malioboro>
- Nekolný, L., & Fialová, D. (2018). Zoo Tourism: What Actually Is a Zoo? *Czech Journal of Tourism*, 7(2), 153–166.
<https://doi.org/10.1515/cjot-2018-0008>
- Okezone.com. (2022). Heboh Tarif Parkir Rp350.000 di Yogya, Sandiaga Minta Pelaku Ditindak Tegas Agar Tak Terulang. *Okezone.Com*.

- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/05/11/513/1101026/kecolongan-pungli-parkir-tepus-dishub-jukir-nakal-objek-wisata-bakal-ditertibkan>
- Pikiranrakyat.com. (2022). Viral Biaya Parkir Bis 2 Jam di Yogyakarta Dikenakan Tarif Rp350 Ribu, Netizen: Pemalakan Pake Kuitansi. Pikiranrakyat.Com. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143520449/viral-biaya-parkir-bis-2-jam-di-yogyakarta-dikenakan-tarif-rp350-ribu-netizen-pemalakan-pake-kuitansi?page=2>
- Pramana, S., Paramartha, D. Y., Ermawan, G. Y., Deli, N. F., & Srimulyani, W. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on tourism in Indonesia. In *Current Issues in Tourism* (Vol. 25, Issue 15, pp. 2422–2442). <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1968803>
- Richards, G., & Wilson, J. (2007). Tourism, creativity and development. In *Tourism, Creativity and Development*. <https://doi.org/10.4324/9780203933695>
- Rindrasih, E. (2018). Under the Volcano: Responses of a community-based tourism village to the 2010 eruption of Mount Merapi, Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 10, Issue 5). <https://doi.org/10.3390/su10051620>
- Seyfi, S. (2017). Reframing sustainable tourism. *Annals of Tourism Research*, 62, 118–119. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.017>
- Shirmohammadi, Y., Jalaliyan, E., Abedi, F., & ... (2020). The Tourism Literacy Impact of Tour Guides on the Satisfaction of Tourists. *Human Geography Quarterly*, 52(4). https://jhgr.ut.ac.ir/article_71594_0.html?lang=en
- suarajogja.com. (2021). Nyaris Tertipu, Wisatawan Pantai Baru Ditagih Rp420 Ribu Beli Makan Warung. Suarajogja.Com.
- Tempo.co. (2017). Patok Harga Tak Wajar, Warung Lesehan di Malioboro Ditutup Paksa. Tempo.Co.
- Tempo.co. (2021). Wisata Yogyakarta Tercoreng Kejahatan Jalanan, Sultan HB X Ambil Langkah ini. Tempo.Co. <https://travel.tempo.co/read/1544702/wisat>
- a-yogyakarta-tercoreng-kejahatan-jalanan-sultan-hb-x-ambil-langkah-ini
- Tribunnews.com. (2022). Pengusaha Kuliner Seafood Pantai Depok Bantul Jamin Tidak Akan Nuthuk Harga ke Wisatawan. Tribunnews.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2022/04/23/pengusaha-kuliner-seafood-pantai-depok-bantul-jamin-tidak-akan-nuthuk-harga-ke-wisatawan>
- Van Schalkwyk, C., & Saayman, M. (2006). A sustainable marketing strategy for Dutch tourists to South Africa. *South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation*, 28(1). <https://doi.org/10.4314/sajrs.v28i1.25935>
- Vergara-Schmalbach, J. C., Maza-Avila, F. J., Martinez-Nagle, O., & Girado-Guzmán, C. A. (2021). Evaluation of the quality of the tourist service offered to foreign tourists in the City of Cartagena de Indias, Colombia. In *Tourism and Hospitality Management* (Vol. 27, Issue 2, pp. 293–314). <https://doi.org/10.20867/THM.27.2.4>
- waspada.co.id. (2022). Viral Curhatan Sopir Kendaraan Wisatawan, Mulai Dari Dicegat Hingga Dipaksa Naik Jip Wisata di Kompleks Objek Wisata Kaliurang. Waspada.Co.Id. <http://redaksi.waspada.co.id/v2021/2022/05/viral-curhatan-sopir-kendaraan-wisatawan-mulai-dari-dicegat-hingga-dipaksa-naik-jip-wisata-di-kompleks-objek-wisata-kaliurang/>
- Wibisono, B. H., & Sulistya, A. Y. (2022). Contemporary urban development of Yogyakarta municipality's peri-urban areas. In *World Review of Science, Technology and Sustainable Development* (Vol. 18, Issue 2, pp. 135–158). <https://doi.org/10.1504/WRSTSD.2022.121305>
- Wilks, J., Pendergast, D., & Leggat, P. (2005). Tourism in turbulent times: Towards safe experiences for visitors. In *Tourism in Turbulent Times: Towards Safe Experiences for Visitors*. <https://doi.org/10.4324/9780080457321>
- Wilopo, W., Risanti, Susatio, R., & Putra, D. P. E. (2021). Seawater intrusion assessment and prediction of sea-freshwater interface in

Parangtritis coastal aquifer, South of Yogyakarta Special Province, Indonesia. In *Journal of Degraded and Mining Lands Management* (Vol. 8, Issue 3, pp. 2709–2718).

<https://doi.org/10.15243/JDMLM.2021.083.2709>

Yuningsih, E., & Kusmiarti, E. (2019). Keputusan Berkunjung Berdasarkan Pendekatan Positioning Wisata Edukasi Pada Musium di Kota Bogor. *Jurnal Visionida*, 5(2), 24.
<https://doi.org/10.30997/jvs.v5i2.2204>